

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

33. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) Provinsi

A RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DBH SAWIT

A.1 RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMPENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024					
						PROVINSI					
1	2	3	4	5	6	7					
1	Penanganan jalan	1 Kegiatan Utama									
		a. rekonstruksi/peningkatan struktur;	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi/peningkatan jalan	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan
		b. pemeliharaan berkala;	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan berkala	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
		c. pemeliharaan rutin;	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan rutin	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan
		2 Kegiatan Penunjang									
		a. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; dan/atau	Jumlah kegiatan konsultan pengawas kegiatan	Paket	Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
b. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	Jumlah perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan	Frekuensi	Pemerintah Daerah								
2	Penanganan jembatan	1 Kegiatan Utama									
		a. pemeliharaan berkala jembatan;	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan
		b. penggantian jembatan; dan/atau	Panjang jembatan yang dilakukanPenggantian	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan
		c. pembangunan jembatan.	Panjang Jembatan yang dibangun	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan
		2 Kegiatan Penunjang									
		a. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; dan/atau	Jumlah kegiatan konsultan pengawas kegiatan	Paket	Pemerintah Daerah	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
b. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	Jumlah perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan	Frekuensi	Pemerintah Daerah								

A.2 RINCIAN KEGIATAN LAINNYA PENGGUNAAN DBH SAWIT

1	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	1 Kegiatan Utama									
		a. Sosialisasi Kegiatan di tingkat pekebun	Pertemuan	Frekuensi	Masyarakat	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		b. Peningkatan kapasitas tim pendataan	Bimbingan teknis	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
		c. Pendataan pekebun	Sensus	Orang	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
		d. Verifikasi dan validasi data pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		e. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	Survey	Persil	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
		f. Penerbitan STDB	Penerbitan surat	Dokumen	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani
		2 Kegiatan Penunjang									
		a. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, bimbingan teknis, pendataan, dan verifikasi	Perjalanan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
		b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka bimbingan teknis	Honor	Laporan	Narasumber	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		c. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka verifikasi dan validasi data	Honor	laporan	Narasumber	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petan
		d. Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemetaan dan pengolahan data	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		1) GPS Hand Held	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		2) Laptop dilengkapi aplikasi pemetaan (arcgis)	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		3) Kendaraan untuk survey lapangan	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		4) ATK	Belanja bahan	Paket	Pemerintah Daerah						
5) Printer	Sewa alat	unit	Pemerintah Daerah								
6) Ruang pertemuan	Sewa alat	unit	Pemerintah Daerah								
2	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	1 Kegiatan Utama									
		a. Pembentukan tim penyusun	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian
		b. Identifikasi dan pendataan program dan kegiatan	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
		c. Perumusan rencana aksi	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian
		d. Konsultasi/Uji publik	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		e. Penetapan rencana aksi	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian
		2 Kegiatan Penunjang									
		a. Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan tim, identifikasi dan pendataan program, perumusan rencana aksi, konsultasi publik, dan penetapan rencana aksi	Perjalanan dinas	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan pengembangan prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian
		b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka konsultasi/uji publik	Honor	Laporan	Narasumber	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
		c. Penyediaan sarana pengolahan data program kegiatan	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian
1) Laptop	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian		
2) Printer	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah								

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024															
						PROVINSI															
1	2	3	4	5	6	7															
3	Pembinaan dan Pendampingan Untuk Sertifikasi Internal Control System (ISPO) Pekebun	1 Kegiatan Utama																			
		a. Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO	Survey	Data pekebun	a. Pekebun b. Perusahaan c. Pemerintah Daerah	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani										
		b. Sosialisasi sertifikasi ISPO	Sosialisasi	Orang	Pekebun	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian										
		c. Pelatihan sertifikasi ISPO	Pelatihan	Orang	Pekebun	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani										
		d. Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO	Bimbingan teknis	Frekuensi	Pekebun	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani										
						3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya										
		1) Pembentukan tim kendali internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		2) Penyusunan prosedur/mechanisme terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		3) Sosialisasi prosedur/mechanisme kepada anggota kelembagaan	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		4) Pengelolaan catatan terkait aktivitas pekebun dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO termasuk pengelolaan catatan kelompok tani/koperasi	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		5) Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		6) Pelatihan Teknik audit kepada tim kendali internal	Pelatihan	Orang	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		7) Penjadwalan kegiatan audit internal dan pelaksanaan audit internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
		9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah																
			2 Kegiatan Penunjang																		
			a. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka pelatihan sertifikasi ISPO	Honor	laporan	Laporan	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian									
			b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pekebun	Perjalanan dinas	Frekuensi	Pelaksana	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan petani									
			c. Penyediaan sarana pendukung pengolahan data sertifikasi ISPO	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya									
			1) Kendaraan operasional lapangan	Sewa alat	Unit	Pelaksana															
	2) Laptop	Sewa alat	Unit	Pelaksana																	
	3) Printer	Sewa alat	Unit	Pelaksana																	
	4) Infocus	Sewa alat	Unit	Pelaksana																	
	5) ATK	Sewa alat	Unit	Pelaksana																	
	6) Ruang pertemuan	Sewa alat	Unit	Pelaksana																	
4	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	1 Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)																			
		a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen Perencanaan	Unit	Pemerintah	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)										
		b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara										
		c. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara										
		d. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara										
		e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	Pemerintah	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan										
		f. Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan										
		g. Pembangunan gully plug	Bangunan Gully plug	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug										
		h. Pembangunan Dam Penahan	Bangunan Dam Penahan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan										
		i. Pembangunan Sumur resapan	Bangunan Sumur Resapan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan										
		j. Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2										
			2 Perbenihan Tanaman Hutan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)																		
			a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha	Unit Usaha	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan									
			b. Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih									
			c. Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih									
			d. Sertifikasi Mutu Bibit	Bibit tanaman	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit									
			e. Pengawasan Peredaran Benih Dan/Atau Bibit	Data (Asal usul, jenis Mutu) Benih atau Bibit	Laporan	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit									
			f. Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih									
			g. Pengelolaan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih									
			h. Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Kegiatan pembinaa	Kali	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan									
			i. Pembuatan Dan Pengadaan Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan									
			3 Pemulihan Lingkungan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota)																		
			a. Kegiatan Penghijauan Lingkungan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat															
			b. Pembangunan Hutan Kota	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat															
			c. Perlindungan Mata Air, Kanan Kiri Sungai, Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat															
			d. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamenan Air Hujan, Sumur Resapan Air, Lubang Biopori)	Bangunan Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamenan Air Hujan, Sumur Resapan Air, Lubang Biopori	Unit	Pemerintah dan Masyarakat															

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024					
						PROVINSI					
1	2	3	4	5	6	7					
5	Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Orang	Masyarakat	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
						1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat